

PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DI DESA TANJUNG TIRAM KECAMATAN MORAMO UTARA KABUPATEN KONawe SELATAN

Jopang¹, Zulfiah Larisu², La Ode Mustafa R³, Syamsul Alam⁴, Ambo Upe⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Halu Oleo Kendari
e-mail: jopang@uho.ac.id

Abstrak

Tujuan kegiatan ini untuk mengedukasi masyarakat melalui pelatihan penyusunan rencana Pembangunan desa. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan secara participatory learning. Metode ini meliputi kegiatan diskusi dan praktek langsung bersama 20 orang peserta yang terdiri dari aparat, pemuda, kader dan kelompok PKK desa, terkait pentingnya keterampilan dalam penyusunan rencana Pembangunan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi masalah sesuai dengan kebutuhannya dan memprioritaskan sebagai program dalam penyusunan perencanaan Pembangunan desa. Selain itu, peserta dapat meningkatkan pemahamannya terkait faktor yang mempengaruhi penyusunan perencanaan pembangunan dan solusi mengatasinya. Faktor campur tangan penguasa dalam penyusunan perencanaan dapat diatasi melalui kerjasama Asosiasi Kepala Desa untuk menolak cara-cara tidak baik. Keterampilan penyusunan perencanaan pembangunan merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh aparat desa khususnya. Perencanaan Pembangunan yang baik menjadi kekuatan dalam penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta terhindar dari praktik-praktik Pembangunan yang tidak terukur keberhasilannya.

Kata kunci: Perencanaan Pembangunan, Desa Tanjung Tiram, Partisipasi Pembangunan

Abstract

The pupose of this activity is to educate the community through training in preparing village development plans. The method of implementing activities is participatory learning. This method includes discussion and direct practice activities with 20 participants consisting of officials, youth, cadres and village PKK groups, regarding the importance of skills in preparing village development plans. The results of the activity showed that the majority of participants were able to identify problems according to their needs and prioritize them as programs in preparing village development plans. Apart from that, participants can increase their understanding regarding the factors that influence the preparation of development plans and solutions to overcome them. The factor of government interference in planning preparation can be overcome through the cooperation of the Village Heads Association to reject bad methods. The skill of preparing development planning is an important thing that must be possessed by village officials in particular. Good development planning is a strength in budgeting and implementing development, and avoids development practices whose success cannot be measured.

Keywords: Development Planning, Tanjung Tiram Village, Development Participation

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini menjadikan pembangunan desa sebagai lokus pembangunan yang tidak luput dari perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Ariadi, 2019; Juniati et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun tujuan dari pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Permendes, 2020).

Paradigma yang tengah berkembang belakangan ini adalah melihat desa sebagai pertumbuhan ekonomi wilayah pedesaan. Setiap desa mendapatkan sumber pendanaan pembangunan melalui APBN. Dana tersebut merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang penggunaannya terutama untuk menyediakan infrastruktur desa, memajukan perekonomian dan sosial-budaya masyarakat setempat. Dengan APBDes, diharapkan desa relatif mandiri dalam

pembangunan, yang sebelumnya sangat bergantung pada bantuan provinsi dan kabupaten (Purwaningsih, 2022; Larisu et al., 2018)

Pengelolaan APBDes desa diharuskan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMdes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPdes) tahunan. Penyusunan kedua rencana tersebut bersifat '*bottom up*', yang melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, dan mekanisme penyusunannya dalam skim musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Musrenbangdes ini harus terintegrasi dengan musrenbang Kabupaten. Tuntutan tersebut relatif baru karena sebelumnya menganut pola '*top down*' yang bersifat sentralistik. Lingkup RKPdes mencakup semua sektor ekonomi dan segenap aspek sosial-budaya masyarakat (Purwaningsih, 2022; Zulaifah, 2020).

Desa Tanjung Tiram salah satu desa pesisir di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Penduduknya berjumlah 687 jiwa dengan kepala keluarga 205 KK. Sebanyak 122 KK merupakan penerima bantuan langsung tunai. Sebagian besar warganya bekerja sebagai nelayan penangkap ikan tradisional, petani rumput laut, berkebun dan tenaga pemecah batu Moramo (Sideni, Sideni; Ahmad, Sabir; Armawaddin, 2021). Potensi sumber daya alam lainnya, lahan hijau untuk beternak sapi, kambing, ayam serta hutan mangrove yang lebat dan hijau, dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai/bahari (Muliati et al., 2018).

Berdasarkan pengamatan di lapangan aparat desa Tanjung Tiram mengalami kesulitan dalam menyusun rencana program pembangunannya. Kesulitan tersebut berkaitan dengan kurangnya SDM (pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun perencanaan), kelengkapan data/informasi karena cakupannya menyeluruh (bidang dan sektor), keterbatasan waktu dalam menyelaraskan/menyesuaikannya dengan RPJM Kabupaten dan rencana sectoral, sehingga terkadang terlambat dalam pelaporannya. Fenomena ini selanjutnya dianggap perlu diadakan pelatihan dalam penyusunan RKPdes, yang merupakan rencana pembangunan tahunan sebagai implementasi dari RPJMdes. Pelatihan penyusunan perencanaan program ini, dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Pelatihan adalah proses pembelajaran keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk melaksanakan pekerjaan (Jumawan & Mora, 2018).

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi ceramah, diskusi, pendampingan dan evaluasi. Ceramah untuk penyajian materi. ceramah, diskusi, pendampingan dan evaluasi. Ceramah diberikan kepada peserta yang bertujuan untuk menambah pengetahuan terkait pentingnya pemahaman cara menyusun perencanaan pembangunan yang meliputi apa itu perencanaan pembangunan pedesaan, dan bagaimana perencanaan pembangunan itu dilakukan, dan untuk apa perencanaan pembangunan desa itu serta hal-hal yang dapat mempengaruhi dalam perencanaan Pembangunan desa. Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 orang aparat desa, kader dan pendamping desa, bertempat di Balai Desa Tanjung Tiram. Sementara, pemateri terdiri dari Tim Pengajar Pascasarjana Universitas Halu Oleo terdiri dari Dr. Jopang, S.Pd., M. Si, Dr. Zulfiah Larisu, S. Sos., M. Si, Dr. La Ode Mustafa R, M.Si, Dr. Syamsul Alam, M.Si., dan Dr. Ambo Upe, S.Sos., M.Si.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian materi telah memperjelas pengetahuan masyarakat terkait dengan perencanaan, perencanaan Pembangunan, perencanaan Pembangunan desa, sumber-sumber data yang dapat dijadikan bahan perencanaan, bidang-bidang perencanaan yang terdapat dalam perencanaan Pembangunan desa serta proses dan akibatnya.

Perencanaan dikatakan sebagai proses memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai (Ariadi, 2019; Nugrahanti, 2023). Sedangkan perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan pendapat Londa et al., (2021). Kemudian, disampaikan pula pembuatan suatu perencanaan pembangunan harus mengikutsertakan secara aktif setiap warga negara atau kelompok masyarakat baik dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan yang tujuannya untuk mengatur kehidupan bersama, sesuai dengan Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan yang terdapat

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Mendagri, 2014).

Penyusunan perencanaan Pembangunan di desa Tanjung Tiram mengikuti tahap-tahap yang telah digariskan dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 yaitu dilakukan dengan cara musyawarah dimulai dari penggalian gagasan lewat musyawarah dusun, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa (Ashari & Nugrahanti, 2021). Disana dilakukan musyawarah mufakat jika ada perbedaan pendapat pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak (Bramantyo, 2022). Namun selama ini, perencanaan pembangunan desa ditempuh dengan musyawarah mufakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa disusun sebagai perwujudan visi dan misi dari Kepala Desa (Kades) dan tentunya pada proses penyusunannya telah melibatkan seluruh komponen masyarakat dan mencakup bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Legowo et al., 2021; Andaningsih et al., 2022). Karena tujuan perencanaan Pembangunan pada dasarnya adalah untuk menciptakan kemajuan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan, tanpa mengabaikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Londa et al., 2021; Larisu & Jopang, 2022).

Perencanaan pembangunan di desa Tanjung Tiram telah disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Isinya mencakup komponen penting dari aspek perencanaan pembangunan antara lain mencakup: (1) perencanaan pembangunan ekonomi, menitik beratkan pada usaha peningkatan pendapatan masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi potensial, meningkatkan produktifitas hasil laut dan perikanan, dapat memperbaiki efisiensi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor pelayanan publik. (2) perencanaan pembangunan lingkungan, bertujuan untuk memelihara keseimbangan ekologi untuk menciptakan kondisi alamiah lingkungan yang ramah dan bersahabat, (3) perencanaan pembangunan kelembagaan, yakni mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, memperbaiki tata kerja administratif, desentralisasi dan mobilisasi sumber daya, penguatan lembaga, (4) pembangunan fisik dan sosial, di antaranya adalah memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan, lapangan kerja serta mengembangkan keahlian tenaga kerja dan memperbaiki kualitas fasilitas pelayanan dan infrastruktur. Dengan kegiatan pelatihan penyusunan perencanaan desa ini, berbagai potensi desa terungkap dan menambah wawasan peserta pelatihan. Potensi tersebut tidak disadari termasuk komponen penting dalam perencanaan pembangunan seperti pengembangan modal sosial, pengembangan potensi desa wisata, dan nilai-nilai kearifan lokal (disampaikan oleh Pemateri).

Desa Tanjung Tiram secara geografis berada di sepanjang pesisir pantai dengan hutan mangrove yang lebat dan hijau, dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan sebagai wisata pantai/bahari. Hal ini dapat menjadi pendorong terbentuknya pariwisata bahari di desa Tanjung Tiram. Demikian pula kondisi fisik, budaya, flora dan fauna serta kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, telah mampu menciptakan sistem yang spesifik dan khas. Terlebih daerah ini didukung dengan kondisi lingkungan, sumber daya alam dan sosial budaya setempat. Potensi sumber daya alam lainnya, hasil perkebunan cukup melimpah seperti kelapa, jambu mete, pisang dan sayur-sayuran, serta potensi lahan hijau untuk beternak sapi, kambing, yang menjadikan desa Tanjung Tiram dapat berkembang sebagai desawisata (Muliati et al., 2018).

Pelatihan penyusunan perencanaan Pembangunan di Desa Tanjung Tiram telah memberi wawasan dalam mengatasi faktor yang mempengaruhi kurang optimal dalam pelaksanaan Pembangunan. Sebagaimana dikemukakan Pendamping Desa Tanjung Tiram (HR) bahwa terkadang perencanaan telah disusun secara idealis sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, namun di lapangan tidak dapat dilaksanakan dan program yang terlaksana justru yang tidak terdapat dalam perencanaan yang ditetapkan, karena adanya campur tangan para penguasa. Solusi atau strategi yang ditawarkan oleh Pemateri adalah membangun modal sosial, seperti kerjasama kepala desa dengan aparatnya untuk menolak/merubah cara-cara yang tidak ideal tersebut. Atau, membangun jaringan antar kepala desa melalui asosiasi kepala desa untuk bersepakat menolak program-program titipan yang tidak menjadi prioritas desa (disampaikan oleh Pemateri).

Pentingnya perencanaan atau dokumen perencanaan desa sebagai dasar penganggaran dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Konsistensi menjadi penting karena dalam penganggaran adalah berlandaskan pada basis perencanaan (Alfiana et al., 2023). Selain itu, konsistensi akan menghindari terputusnya mata rantai (*missing link*) antara akumulasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang sudah tertuang pada RPJMDesa dan RKPDes bersama produk penganggarnya (Daerah, 2021). Suatu perencanaan yang matang akan menghasilkan hasil yang baik

dan maksimal, bagitu juga sebaliknya perencanaan yang kurang matang atau tidak baik maka akan membuahkan hasil yang tidak maksimal juga (Sholahuddin et al., 2021).

Keberhasilan pelatihan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kegiatan pelatihan, materi yang akan disampaikan serta faktor pembicara (Wilyanti et al., 2023; Krisnawati & Asfahani, 2022). Apakah pembicara dapat menguasai materi serta sasaran yang dituju, kondisi peserta, proses penyelenggaraan, sarana serta metode yang digunakan. Kegiatan dilakukan dengan cara tanya jawab dan pengayaan informasi kepada masyarakat dalam bentuk ceramah mengenai pentingnya perencanaan dalam pembangunan (Jumawan & Mora, 2018).

Setelah dilakukan pemaparan materi, peserta dilatih untuk merumuskan tema-tema atau masalah desa yang prioritas untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan. Misalnya, yang berasal dari kelompok kader kesehatan dengan tema penanggulangan stunting, kelompok pemuda dengan program penguatan lembaga kepemudaan melalui *soft skill*, kelompok masyarakat pesisir dengan tema program peningkatan produktivitas hasil pantai dan laut, kelompok PKK dengan program pemberdayaan ibu-ibu melalui toga.

Melalui kegiatan pelatihan ini, diharapkan peserta atau masyarakat untuk selalu terlibat dalam penyusunan perencanaan Pembangunan, dan terjadi kesinambungan program Pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Target sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah masyarakat yang mempunyai wawasan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan desa. Kegiatan dilakukan dengan cara ceramah dan pendampingan dalam memahami mengenai cara-cara penyusunan perencanaan Pembangunan desa. Pelatihan ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memberikan edukasi terkait keterampilan dalam perencanaan dan memudahkan masyarakat dalam hal menyelesaikan masalah-masalah Pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Desa Edukasi Digital Di Era Teknologi. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7113–7120.
- Andaningsih, I. G. P. R., Trinandari, T., Novita, N., & Kurnia, K. (2022). Pemberdayaan Umkm Melalui Digitalisasi Keuangan Menggunakan Aplikasi Catatan Keuangan Di Pasar Kranggan Wilayah Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Abdimas Bsi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 143–155.
- Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Ashari, H., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pencatatan Provisi Pada Otoritas Penjamin Simpanan:(Studi Pada Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia). *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(1), 1–14.
- Bramantyo, R. Y. (2022). Peran Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Lembaga Musyawarah Masyarakat Desa Dalam Kedudukannya Sebagai Pemerintah Desa Terhadap Perencanaan Pembangunan Desa. *Transparansi Hukum*, 5(1), 152–167.
- Daerah, D. R. (N.D.). *s u m b a n g a n p e m i k i r a n c o r o n a v i r u s d i s e a s i 2 0 1 9 (c o v i d - 1 9) d i s u m a t e r a u t a r a t a h u n 2 0 2 0*.
- Jumawan, J., & Mora, M. T. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Korporasi. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (Jrmb) Fakultas Ekonomi Uniat*, 3(3), 343–352. <https://doi.org/10.36226/Jrmb.V3i3.153>
- Juniati, J., Larisu, Z., & Iba, L. (2021). Perencanaan Digitalisasi Perpustakaan Pada Upt Perpustakaan Universitas Halu Oleo. *Jurnal Literasi Perpustakaan Dan Informasi: Jurnal Penelitian Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 1(1), 23–34. <https://doi.org/10.52423/Jlpi.V1i1.16281>
- Krisnawati, N., & Asfahani, A. (2022). Penggunaan Media Aktual Dalam Pembelajaran Akidah Akhlak Untuk Kelas Bawah Mi/Sd. *Basica: Journal Of Primary Education*, 2(1), 16–28.
- Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, 26(2), 622–629. <https://doi.org/10.46984/Sebatik.V26i2.2050>
- Larisu, Z., Utha, A., Harianto, E., Prodi, D., Publik, A., Pascasarjana, P., & Halu, U. (2018). Kapasitas

- Perencanaan Desa. *Publicuho Faculty Ofsocialandpoliticalscienceshaluoleo*, 1(3), 40–54.
- Legowo, M. B., Widiiputra, H. D., & Nugrahanti, T. P. (2021). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi Digital Untuk Umkm Di Wilayah Jakarta Timur. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 2(2), 76–90.
- Londa, V. Y., Ruru, J., & Onnoa, R. (2021). Perencanaan Pembangunan Di Desa Musi Satu Kecamatan Kalongan Kabupaten Kepulauan Talaud Rutli. *Jurnal Administrasi*, 7(102), 43–52.
- Mendagri. (2014). *Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pedoman Pembangunan Desa*.
- Muliati, T., A., N., & Piliانا, W. O. (2018). Social Economic Condition Of Fishermen Community In Tanjung Tiram Village, North Moramo District, South Konawe Regency. *Jurnal Sosial Ekonomi Fpik Uho*, 3(3), 216–228.
- Nugrahanti, T. P. (2023). Analyzing The Evolution Of Auditing And Financial Insurance: Tracking Developments, Identifying Research Frontiers, And Charting The Future Of Accountability And Risk Management. *West Science Accounting And Finance*, 1(02), 59–68.
- Permendes. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemendesa Pdtt*, 73.
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah Dalam Proses Perencanaan Dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 6(1), 151–164. <https://doi.org/10.32630/Sukowati.V6i1.346>
- Sholahuddin, N., Asqi, H., Rahmawati, S., & Rizqiyah, N. (2021). Fungsi Perencanaan Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadist. *Leadership:Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 186. <https://doi.org/10.32478/Leadership.V2i2.718>
- Sideni, Sideni; Ahmad, Sabir; Armawaddin, M. (2021). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pltu Dan Kondisi Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Di Desa Tanjung Tiram Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan. 02, 687–694.
- Wilyanti, L. S., Wulandari, S., Asfahani, A., & Priyanto, P. (2023). Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mendeley Untuk Sitasi Artikel Ilmiah Pada Jurnal Bereputasi Nasional. *Amalee: Indonesian Journal Of Community Research And Engagement*, 4(1), 55–64.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlungang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i1.981>